



## **BUPATI PROBOLINGGO**

---

### **PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 70 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**BATAS PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Pengajuan Uang Persediaan (UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016 ;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.



4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Pengeluaran, adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Pembantu Bendahara Pengeluaran, adalah orang yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan dan melaksanakan fungsi sebagai kasir, Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang atau Pengurusan Gaji.
10. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP, adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
12. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.



14. Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU, adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
15. Pengguna Anggaran, adalah pejabat pemegang wewenang pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

## BAB II UANG PERSEDIAAN

### Pasal 2

- (1) SKPD dapat diberikan UP sekali dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1/12 (satu per dua belas) dari Pagu Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang serta Jasa yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (3) UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bendahara SKPD untuk dikelola sebagai uang muka kerja.
- (4) Penggunaan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (5) UP disimpan pada rekening kas daerah atas nama Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (6) Untuk UP termasuk tambahan uang persediaan di SKPD yang nilainya UPnya sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka Bendahara Pengeluaran wajib mengendalikan uang tunai (kas tunai) maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di brankas.
- (7) Untuk UP termasuk tambahan uang persediaan di SKPD yang nilainya UPnya diatas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Bendahara Pengeluaran wajib mengendalikan uang tunai (kas tunai) maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di brankas.



- (8) Untuk UP termasuk tambahan uang persediaan di SKPD yang nilainya UPnya diatas Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Bendahara Pengeluaran wajib mengendalikan uang tunai (kas tunai) maksimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di brankas.
- (9) Untuk UP termasuk tambahan uang persediaan di SKPD yang nilainya UPnya diatas Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Bendahara Pengeluaran wajib mengendalikan uang tunai (kas tunai) maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di brankas.
- (10) Sisa UP pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke rekening kas daerah paling lambat akhir Desember Tahun Anggaran berkenaan.

### BAB III

#### PENGUNAAN DANA UANG PERSEDIAAN

##### Pasal 3

UP hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa serta Belanja Tidak Langsung dan harus dipertanggungjawabkan.

### BAB IV

#### GANTI UANG PERSEDIAAN

##### Pasal 4

Penggantian UP dapat dilakukan dengan mengajukan SPM-GU setelah laporan pertanggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaran atas Pengajuan Dana SPM UP sebelumnya yang sudah disahkan.

### BAB V

#### TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

##### Pasal 5

- (1) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD selaku BUD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (2) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambah uang disetor ke rekening kas umum daerah.
- (3) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk :
  - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan ;
  - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 15 Desember 2015

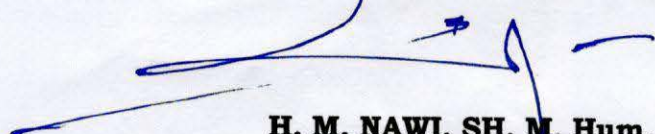
**BUPATI PROBOLINGGO**



**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015  
tanggal ..... 16 Desember 2015 ..... Nomor ..... 70 ..... Seri C1.

Sekretaris Daerah



**H. M. NAWI, SH. M. Hum.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19590527 198503 1



**JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2016**

| NO. | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)                       | PLAFON ANGGARAN BELANJA |                         |  |   | BESARNYA UANG PERSEDIAAN |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|--|---|--------------------------|
|     |  | BELANJA PEGAWAI         | BELANJA BARANG DAN JASA | JUMLAH (BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA BARANG/JASA) | JUMLAH (BELANJA HIBAH, BANSOS, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA |                          |
| 1   | 2  | 3                       | 4                       | 5 = { 3 + 4 }                                    | 6   | 7                        |
| 1   | Dinas Pendidikan   | 14,687,700,000          | 29,649,709,050          | 44,337,409,050                                   | -   | 1,000,000,000            |
| 2   | Dinas Kesehatan  | 5,993,700,000           | 67,833,653,475          | 73,827,353,475                                   | -   | 1,000,000,000            |
| 3   | RSUD Waluyoaji Kraksaan { SKPD }                           | 3,449,725,000           | 5,818,250,000           | 9,267,975,000                                    | -   | 50,000,000               |
| 4   | RSUD Tongas (SKPD )  | 979,800,000             | 1,848,715,000           | 2,828,515,000                                    | -   | 235,000,000              |
| 5   | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga                            | 874,525,000             | 5,313,201,305           | 6,187,726,305                                    | -   | 500,000,000              |
| 6   | Dinas Pekerjaan Umum Pengairan                             | 892,275,000             | 16,418,850,000          | 17,311,125,000                                   | -   | 650,000,000              |
| 7   | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya                           | 555,977,500             | 31,454,400,430          | 32,010,377,930                                   | -   | 650,000,000              |
| 8   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                       | 823,665,000             | 6,770,902,700           | 7,594,567,700                                    | -   | 630,000,000              |
| 9   | Dinas Perhubungan  | 1,509,550,000           | 3,581,384,000           | 5,090,934,000                                    | -   | 424,000,000              |
| 10  | Badan Lingkungan Hidup                                     | 1,135,050,000           | 32,514,719,000          | 33,649,769,000                                   | -   | 700,000,000              |
| 11  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                    | 863,700,000             | 4,200,300,000           | 5,064,000,000                                    | -   | 400,000,000              |
| 12  | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana        | 830,650,000             | 4,062,735,000           | 4,893,385,000                                    | -   | 400,000,000              |
| 13  | Dinas Sosial   | 514,210,000             | 6,239,640,000           | 6,753,850,000                                    | -   | 550,000,000              |
| 14  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                        | 450,500,000             | 2,374,925,000           | 2,825,425,000                                    | -   | 235,000,000              |
| 15  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                        | 630,950,000             | 6,331,622,500           | 6,962,572,500                                    | -   | 580,000,000              |
| 16  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                   | 394,050,000             | 8,184,950,000           | 8,579,000,000                                    | -   | 700,000,000              |
| 17  | Kantor Penanaman Modal dan Perijinan                       | 370,950,000             | 2,134,050,000           | 2,505,000,000                                    | -   | 200,000,000              |
| 18  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                            | 401,025,000             | 2,802,055,000           | 3,203,080,000                                    | -   | 265,000,000              |
| 19  | Kantor Pemuda dan Olah Raga                                | 290,325,000             | 2,990,657,000           | 3,280,982,000                                    | -   | 270,000,000              |
| 20  | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat | 463,100,000             | 2,830,400,000           | 3,293,500,000                                    | -   | 270,000,000              |
| 21  | Satuan Polisi Pamong Praja                                 | 1,234,050,000           | 3,490,950,000           | 4,725,000,000                                    | -   | 350,000,000              |
| 22  | Bagian Pemerintahan  | 124,300,000             | 2,380,900,000           | 2,505,200,000                                    | -   | 200,000,000              |
| 23  | Bagian Hukum   | 205,950,000             | 1,736,275,000           | 1,942,225,000                                    | -   | 160,000,000              |
| 24  | Bagian Organisasi  | 97,500,000              | 2,203,900,000           | 2,301,400,000                                    | -   | 190,000,000              |
| 25  | Bagian Penyusunan Program                                  | 310,550,000             | 1,747,995,000           | 2,058,545,000                                    | -   | 200,000,000              |
| 26  | Bagian Komunikasi dan Informasi                            | 129,000,000             | 3,306,000,000           | 3,435,000,000                                    | -   | 285,000,000              |
| 27  | Bagian Kesejahteraan Rakyat                                | 29,275,000              | 6,743,925,000           | 6,773,200,000                                    | -   | 400,000,000              |
| 28  | Bagian Umum  | 87,100,000              | 15,532,875,000          | 15,619,975,000                                   | -   | 750,000,000              |
| 29  | Bagian Protokol dan Rumah Tangga                           | 64,550,000              | 3,566,900,000           | 3,631,450,000                                    | -   | 300,000,000              |
| 30  | Bagian Pengelolaan dan Pengadaan                           | 387,500,000             | 4,201,550,000           | 4,589,050,000                                    | -   | 380,000,000              |
| 31  | Sekretariat DPRD   | 494,375,000             | 24,486,950,000          | 24,981,325,000                                   | -   | 800,000,000              |
| 32  | Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)                   | 963,275,000             | 6,909,225,000           | 7,872,500,000                                    | -   | 650,000,000              |
| 33  | Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)                   | -                       | -                       | -  | 379,982,432,650   | 300,000,000              |
| 34  | Dinas Pendapatan   | 1,086,710,000           | 6,212,540,000           | 7,299,250,000                                    | -   | 600,000,000              |
| 35  | Inspektorat  | 411,785,000             | 3,200,139,000           | 3,611,924,000                                    | -   | 300,000,000              |
| 36  | Badan Kepegawaian Daerah                                   | 766,300,000             | 5,674,668,000           | 6,440,968,000                                    | -   | 530,000,000              |
| 37  | Kecamatan Dringu   | 121,800,000             | 401,200,000             | 523,000,000                                      | -   | 40,000,000               |
| 38  | Kecamatan Kraksaan   | 192,350,000             | 420,600,000             | 612,950,000                                      | -   | 50,000,000               |
| 39  | Kecamatan Gading   | 139,900,000             | 391,600,000             | 531,500,000                                      | -   | 40,000,000               |
| 40  | Kecamatan Lumbang  | 167,125,000             | 352,575,000             | 519,700,000                                      | -   | 40,000,000               |
| 41  | Kecamatan Tiris  | 104,475,000             | 392,525,000             | 497,000,000                                      | -   | 40,000,000               |
| 42  | Kecamatan Besuk  | 216,640,000             | 313,560,000             | 530,200,000                                      | -   | 40,000,000               |
| 43  | Kecamatan Gending  | 138,600,000             | 359,650,000             | 498,250,000                                      | -   | 40,000,000               |
| 44  | Kecamatan Krejengan  | 187,750,000             | 341,250,000             | 529,000,000                                      | -   | 40,000,000               |
| 45  | Kecamatan Pajarakan  | 165,575,000             | 346,555,000             | 512,130,000                                      | -   | 40,000,000               |
| 46  | Kecamatan Sumber   | 107,550,000             | 391,840,000             | 499,390,000                                      | -   | 40,000,000               |
| 47  | Kecamatan Krucil   | 135,200,000             | 380,200,000             | 515,400,000                                      | -   | 40,000,000               |
| 48  | Kecamatan Tongas   | 140,650,000             | 382,100,000             | 522,750,000                                      | -   | 40,000,000               |
| 49  | Kecamatan Tegalsiwalan                                     | 182,550,000             | 343,450,000             | 526,000,000                                      | -   | 40,000,000               |
| 50  | Kecamatan Wonomerto  | 244,170,000             | 287,680,000             | 531,850,000                                      | -   | 40,000,000               |
| 51  | Kecamatan Leces  | 171,200,000             | 357,300,000             | 528,500,000                                      | -   | 40,000,000               |
| 52  | Kecamatan Sukapura   | 127,100,000             | 373,500,000             | 500,600,000                                      | -   | 40,000,000               |



| 1             | 2  | 3                     | 4                      | 5 = ( 3 + 4 )          | 6                      | 7                     |
|---------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 53            | Kecamatan Maron  | 140,600,000           | 393,550,000            | 534,150,000            | -                      | 40,000,000            |
| 54            | Kecamatan Banyuanyar   | 114,750,000           | 366,150,000            | 480,900,000            | -                      | 40,000,000            |
| 55            | Kecamatan Kotaanyar  | 154,650,000           | 367,350,000            | 522,000,000            | -                      | 40,000,000            |
| 56            | Kecamatan Sumberasih   | 140,750,000           | 400,450,000            | 541,200,000            | -                      | 40,000,000            |
| 57            | Kecamatan Kuripan  | 112,350,000           | 407,099,800            | 519,449,800            | -                      | 40,000,000            |
| 58            | Kecamatan Bantaran   | 107,950,000           | 391,440,000            | 499,390,000            | -                      | 40,000,000            |
| 59            | Kecamatan Paiton   | 177,800,000           | 337,600,000            | 515,400,000            | -                      | 40,000,000            |
| 60            | Kecamatan Pakuniran  | 127,800,000           | 355,800,000            | 483,600,000            | -                      | 40,000,000            |
| 61            | Kelurahan Semampir   | 82,800,000            | 209,200,000            | 292,000,000            | -                      | 20,000,000            |
| 62            | Kelurahan Patokan  | 76,450,000            | 211,400,000            | 287,850,000            | -                      | 20,000,000            |
| 63            | Kelurahan Sidomukti  | 43,050,000            | 181,876,500            | 224,926,500            | -                      | 20,000,000            |
| 64            | Kelurahan Kraksaan Wetan                                     | 54,300,000            | 204,500,000            | 258,800,000            | -                      | 20,000,000            |
| 65            | Kelurahan Kandangjati Kulon                                  | 35,250,000            | 169,310,000            | 204,560,000            | -                      | 20,000,000            |
| 66            | Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana<br>Penyuluhan Pertanian | 487,680,000           | 6,363,932,810          | 6,851,612,810          | -                      | 500,000,000           |
| 67            | Badan Pemberdayaan Masyarakat                                | 543,850,000           | 8,312,610,000          | 8,856,460,000          | -                      | 700,000,000           |
| 68            | Kantor Arsip Daerah  | 162,250,000           | 1,831,250,000          | 1,993,500,000          | -                      | 165,000,000           |
| 69            | Kantor Perpustakaan Umum Daerah                              | 288,750,000           | 2,091,034,500          | 2,379,784,500          | -                      | 200,000,000           |
| 70            | Dinas Pertanian  | 467,200,000           | 10,913,407,000         | 11,380,607,000         | -                      | 700,000,000           |
| 71            | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                         | 535,550,000           | 6,134,730,000          | 6,670,280,000          | -                      | 550,000,000           |
| 72            | Dinas Perkebunan dan Kehutanan                               | 195,925,000           | 9,118,885,000          | 9,314,810,000          | -                      | 700,000,000           |
| 73            | Dinas Perikanan dan Kelautan                                 | 415,600,000           | 5,594,678,575          | 6,010,278,575          | -                      | 500,000,000           |
| 74            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                          | 634,430,000           | 8,215,374,000          | 8,849,804,000          | -                      | 730,000,000           |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>50,146,017,500</b> | <b>403,157,124,645</b> | <b>453,303,142,145</b> | <b>379,982,432,650</b> | <b>21,919,000,000</b> |

BUPATI PROBOLINGGO

  
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE